**KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI**

****

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG**

**2023-2023**

**AGENDA SIDANG KONGRES MAHASISWA**

**UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI**

**TEBUIRENG JOMBANG**

**TAHUN 2023**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Waktu** | **Agenda** | **Keterangan** |
| 07.30 - 08.00 | Checking peserta |  |
| **Pleno** |
| 08.00 - 09.00 | Sidang Pleno IPembacaan Agenda SidangPenetapan Agenda Sidang | Pimsid Sementara (BPH) |
| 09.00 - 09.30 | Sidang Pleno IIPembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang | Presidium Sidang Pleno |
| 09.30 - 11.00 | Sidang Pleno IIIPemilihan dan Penetapan Presidium Sidang TetapKonsolidasi FakultasPandangan Umum Terhadap LPJ BEM U Diwakilkan oleh Ketua Umum BEM FPembahasan dan Penetapan rekomendasi kerjaPenetapan LPJ Pengurusan BEM UDemisioner Pengurus BEM U | Presidium Sidang |
| 11.00 - 12.00 | ISHOMA | All |
| 12.00 - 13.00 | Sidang Pleno IVPembahasan dan Penetapan GBHOPembahasan dan Penetapan AD/ART | MC |
| 13.00 - 13.30 | Sosialisasi Pemilu Raya | KPUM |
| 13.30 - 13.45 | Penutup | All |

**TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG**

**KONGRES MAHASISWA**

**UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI**

**TEBUIRENG JOMBANG**

**TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tata tertib pemilihan merupakan pedoman dalam memilih dan menetapkan pimpinan sidang dalam Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari.

BAB II

PIMPINAN SIDANG

Pasal 2

Pimpinan sidang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya sidang-sidang dalam Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari.
2. Memimpin atau mengajukan seorang untuk menjadi pemimpin sidang pleno
3. Pimpinan sidang harus memahami tehnik persidangan.
4. Pimpinan sidang pernah menjadi pimpinan sidang (pimsid)

BAB III

PEMILIHAN

Pasal 4

Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL)

Pasal 5

Pemilihan dilaksanakan melalui dua tahap :

1. Tahap Pencalonan
2. Calon pimpinan sidang dinyatakan sah jika didukung oleh minimal 5 suara
3. Jika hanya ada tiga calon, maka langsung ditetapkan sebagai pimpinan sidang
4. Jika kurang dari tiga calon yang memenuhi syarat maka diadakan pencalonan ulang
5. Tahap Pemilihan
6. Calon dinyatakan sebagai pimpinan berdasarkan rangking suara terbanyak
7. Jika terjadi kesamaan jumlah suara, maka akan diadakan lobi antara team SC dan sesama calon namun jika tidak menemukan keputusan di adakan lobbying/voting.
8. Calon pimpinan sidang dilarang meninggalkan ruangan sidang ketika pemilihan berlangsung.
9. Calon pimpinan sidang dinyatakan gugur menjadi calon pimpinan sidang dan peserta aktif kongres apabila meninggalkan ruangan sidang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh forum.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu :

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

M. Mudhofar Abdul Hadi M. Nasyarudin Firda Dwi Lestari

SURAT KETETAPAN

KONGRES MAHASISWA 2023

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI JOMBANG

Nomor: 01 /KONGRES MAHASISWA/UNHASY-JBG/X/23 TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG

Pimpinan Sidang pleno KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY Jombang adalah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG tentang Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHASY.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHASY.
3. GBHO UNHASY.

Memperhatikan :

KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Tata tertib pemilihan pimpinan sidang.

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu :

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

M. Mudhofar Abdul Hadi M. Nasyarudin Firda Dwi Lestari

SURAT KETETAPAN

KONGRES MAHASISWA 2023

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI JOMBANG

Nomor: 02/KONGRES MAHASISWA/UNHASY-JBG/X/22 TENTANG

PIMPINAN SIDANG

Pimpinan Sidang pleno KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY Jombang adalah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG, maka dipandang perlu adanya Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG tentang Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHASY.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHASY.
3. GBHO UNHASY

Memperhatikan :

KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pimpinan sidang . KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : NASAR

Wakil Ketua : AQIL

Sekretaris : ADE SILVIA

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 OKTOBER 2023

Waktu :11.04 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

M. Mudhofar Abdul Hadi M. Nasyarudin Firda Dwi Lestari

TATA TERTIB PERSIDANGAN

KONGRES MAHASISWA

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG

TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kongres Mahasiswa merupakan badan musyawarah tertinggi dalam tubuh organisasi mahasiswa yang diselenggarakan sekali dalam setahun

Pasal 2

Rekomendasi

Kongres Mahasiswa mengacu pada butir-butir rekomendasi Musyawarah Besar Lembaga Legislatif Mahasiswa UNHASY

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kongres Mahasiswa dilaksanakan untuk :

1. Merumuskan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta GBHO ketetapan organisasi lainnya.
2. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari.

BAB III

PESERTA

Pasal 4

1. Peserta Aktif dalam Kongres Mahasiswa ialah 2 perwakilan DPM Universitas, 2 BEM Universitas, 2 DPM Fakultas, 2 BEM Fakultas, 1 HMP, dan Kosma tiap kelas
2. Peserta peninjau terdiri dari UKM, 1 delegasi organisasi cabang, 1 demisioner

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Delegasi

1. Peserta aktif memiliki hak bicara dan hak suara
2. Peserta peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara

Pasal 6

Kewajiban Delegasi

1. Mentaati ketentuan persidangan yang telah disepakati.
2. Mengikuti jalannya proses persidangan dari awal hingga akhir, tanpa adanya pengganti.
3. Peserta diberikan batas izin keluar meninggalkan persidangan selama 10 menit dan harus mendapatkan izin pimpinan sidang

BAB VI

KELENGKAPAN SIDANG

Pasal 7

Persidangan dalam Kongres Mahasiswa terdiri atas sidang pleno dan sidang komisi.

Pasal 8

1. Sidang Pleno dan Komisi
2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta kongres
3. Sidang komisi yang dihadiri oleh peserta komisi yang telah ditentukan
4. Sidang komisi merupakan kelompok kerja yang terdiri dari :
5. Bertugas membahas AD/ART
6. Bertugas membahas dan menetapkan GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi)
7. Sidang pleno komisi dihadiri oleh seluruh peserta sidang l

Pasal 10

1. Sidang Pleno dan Komisi
2. Pimpinan sidang pleno terdiri dari seorang ketua , wakil ketua dan sekretaris
3. Pimpinan sidang komisi terdiri dari seorang ketua , wakil ketua dan sekretaris
4. Pimpinan sidang pleno diusulkan oleh Dewan Presidium sidang kemudian dipilih oleh peserta sidang
5. Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan peserta masing-masing.

Pasal 11

Quorum

1. Jumlah qourum persidangan setengah lebih satu dari perwakilan UKM dan Lembaga Kesatuan Mahasiswa UNHASY.
2. Peserta aktif yang meninggalkan forum tanpa izin dari presedium persidangan secara otomatis dinyatakan menyetujui hasil persidangan
3. Apabila poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sidang di skorsing selama 15 menit dan selanjutnya sidang dibuka tanpa memperhatikan quorum

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Pada dasarnya pengambilan keputusan sidang diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila belum tercapai mufakat maka diberikan tambahan waktu atas pertimbangan forum.
3. Jika ketentuan dalam ayat 2 tidak terpenuhi maka diadakan lobying.
4. Jika lobying tidak menghasilkan kesepakatan maka diadakan vooting.
5. Ketentuan suara menggunakan sistem one man one vote (satu orang satu suara)
6. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan Peninjauan Kembali setelah mendapat persetujuan forum.
7. Waktu untuk Peninjauan Kembali dilaksanakan sebelum keputusan sidang ditetapkan.

Pasal 12

Pimpinan Sidang

1. Sidang Pleno merupakan sidang pengambilan keputusan tertinggi dalam Kongres Mahasiswa.
2. Sidang Pleno diikuti oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Kongres Mahasiswa.
3. Pimpinan Sidang Pleno maupun Sidang Komisi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.
4. Pimpinan Sidang Pleno Sementara dipimpin oleh pimpinan yang disepakati oleh peserta
5. Pimpinan Sidang Pleno Tetap dan Pimpinan Sidang Komisi dipilih dari dan oleh peserta sidang.
6. Pimpinan Sidang bertanggungjawab atas terlaksananya proses persidangan dalam Kongres Mahasiswa.
7. Pimpinan Sidang berhak menghentikan pertanyaan, sanggahan atau usul yang dianggap menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang dibahas.
8. Pimpinan Sidang berwenang memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran disiplin.
9. Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipilih diantara peserta oleh para peserta Kongres Mahasiswa UNHASY 2023 dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno Sementara.
10. Pemilihan Pimpinan Sidang Komisi dipilih diantara peserta oleh para peserta Sidang Komisi Kongres Mahasiswa UNHASY 2023 dalam Sidang Komisi.
11. Pimpinan sidang pernah menjadi pimpinan persidangan

BAB VI

DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 13

Disiplin persidangan

1. Peserta persidangan wajib datang tepat waktu. Peserta dianggap pasif apabila datang selambat- lambatnya 15 menit setelah acara dimulai.
2. Menjaga dan menghormati ketertiban sidang.
3. Dilarang memotong interupsi yang dilakukan peserta ataupun peninjau.
4. Peserta aktif dilarang keluar masuk persidangan tanpa ijin dari Pimpinan Sidang.
5. Dilarang memasuki persidangan kecuali delegasi yang namanya tercantum dalam daftar absensi.
6. Dilarang melakukan tindakan anarkis dalam persidangan.

Pasal 14

Sanksi Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran disiplin maka pimpinan sidang berhak:

1. Memberikan peringatan secara lisan ataupun tertulis.
2. Mengeluarkan yang bersangkutan dari proses persidangan atas persetujuan forum.
3. Mencabut status kepesertaannya dalam Kongres Mahasiswa UNHASY 2023 bila delegasi tidak mengikuti 2 kali Sidang Pleno tanpa dimintakan lagi persetujuan forum.
4. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi pertimbangan pimpinan sidang secara langsung

BAB VII

Arti ketukan palu

Pasal 15

1. Satu kali ketukan palu bermaksud mengesahkan hasil setiap point dari persidangan yang dibahas.
2. Dua kali ketukan palu bermaksud: Skorsing sidang; atau Pengalihan pimpinan sidang.
3. Tiga kali ketukan palu bermaksud: Membuka dan menutup sidang; atau Mengesahkan seluruh hasil sidang.
4. Ketukan palu yang lebih dari 3 kali dan tidak beraturan untuk menertibkan peserta yang gaduh

BAB VII

PENUTUP

Pasal 17

Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG TETAP

M. Nazaruddin Aqil Ade Silvia

SURAT KETETAPAN

KONGRES MAHASISWA 2023

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI JOMBANG

Nomor: 03/KONGRES MAHASISWA/UNHASY-JBG/X/22

TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN KONGRES MAHASISWA UNHASY

Pimpinan Sidang Sementara KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY Jombang setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG, maka dipandang perlu adanya Penetapan Delegasi Persidangan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG tentang Penetapan Delegasi Persidangan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHASY.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHASY.
3. GBHO UNHASY

Memperhatikan :

KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Ketetapan ini akan ditinjau dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG TETAP

M. Nazaruddin Aqil Ade Silvia

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA 2023

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI JOMBANG

Nomor: 04/KONGRES MAHASISWA/UNHASY-JBG/X/22

TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pimpinan Sidang Sementara KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY Jombang setelah:

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY, maka dipandang perlu adanya Pengesahan Tata Tertib Persidangan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY tentang Pengesahan Tata Tertib Persidangan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHASY.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHASY.

Memperhatikan :

Hasil Sidang Pleno tentang Tata Tertib Persidangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Tata Tertib Persidangan KONGRES MAHASISWA 2023 UNHASY JOMBANG.

Ketetapan ini akan ditinjau dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG TETAP

M. Nazarudin Aqil Huzail Ade Silvia

ANGGARAN DASAR LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG

TAHUN 2023

BAB I

 PEMBUKAAN

Dengan berkat rahmat dan ma`unat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya sampailah kita kepada kemerdekaan bangsa Indonesia dengan selamat dan sejahtera.

Mahasiswa merupakan elemen tak terpisahkan dari negara dan telah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia yang berkewajiban mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu. dalam perjalanannya membawa masyarakat demi menggapai cita-cita tersebut, perlulah dibentuk, diakomodir secara rapi, serta diberi wadah segala bentuk perjuangan tersebut melalui organisasi bernama LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy’ari yang disingkat LKM UNHASY.

LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASY merupakan miniatur daripada negara yang berangkat dari kebutuhan yang sama serta berkedudukan di lingkungan kampus UNHASY dan sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang merupakan media aktualisasi pembentukan sikap, berfikir, dan bertindak maju serta sebagai wadah penyalur aspirasi Mahasiswa UNHASY yang independen, demokratis, transparan, dan progressif.

Demi kelangsungan berjalannya Organisasi untuk mensejahterakan mahasiswa serta ikut mewujudkan cita-cita bangsa melaui pendidikan, penelitian, dan pengabdian seperti termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dibentuklah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy’ari yang disingkat AD/ART LKM UNHASY.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

Anggaran Dasar, selanjutnya disebut AD, adalah ketentuan perundang-undangan dasar LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASY.

Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut ART, adalah ketentuan perundang-undangan yang merupakan penjabaran angaran dasar.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD/ART, adalah satu kesatuan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan landasan LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy’ari dalam menjalankan roda organisasi.

Undang-Undang, selanjutnya disebut UU, adalah ketentuan perundang-undangan yang dibentuk sebagai pendukung AD/ART dan berlandaskan pada AD/ART.

BAB III

NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Lembaga ini bernama LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy’ari yang selanjutnya disingkat LKM UNHASY

Pasal 3

Waktu

LKM UNHASY ini didirikan di Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang disahkan pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2020 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Tempat

LKM UNHASY Tebuireng Jombang bertempat di lingkungan Universitas Hasyim Asy’ari.

Pasal 5

Kedudukan

LKM UNHASY merupakan organisasi intra kampus tingkat Universitas yang berlokasi di kampus Universitas Hasyim Asy’ari.

BAB IV

ASAS dan PRINSIP

Pasal 6

LKM UNHASY berasaskan Pancasila, demokrasi, dan nilai-nilai keislaman.

Prinsip LKM UNHASY adalah menjunjung tinggi intelektual, pemikiran rasional dan ilmiah, pemberdayaan mahasiswa, rekonstruksi lembaga secara mendasar ke arah yang lebih baik dan otonomi kelembagaan.

BAB V

KEDAULATAN, SIFAT, DAN SISTEM

Pasal 7

Kedaulatan

Kedaulatan dalam LKM UNHASY berada di tangan Mahasiswa yang bertindak sebagai rakyat dan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Lembaga Eksekutif dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Lembaga Legislatif.

Pasal 8

Sifat dan Sistem

LKM UNHASY adalah kedaulatan organisasi yang bersifat independen, demokratis, transparan, dan progressif.

Dalam menjalankan pemerintahannya, LKM UNHASY menggunakan sistem pengawasan, keseimbangan, dan keadilan

BAB VI

TUJUAN, USAHA, FUNGSI

Pasal 9

Tujuan

LKM UNHASY didirikan dengan tujuan :

Mewujudkan dan meningkatkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Memperjuangkan pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan professional. (Memperjuangkan keorganisasian demkratis dan pofesinal)

Terbentuknya pribadi mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat dan memiliki wawasan yang luas, berkecendekiawanan, berkewirausahaan, dan berkepedulian sosial.

Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya dalam artian seluas-luasnya.

Pasal 10

Usaha

Dalam hal tercapainya tujuan organisasi, LKM UNHASY melaksanakan usaha-usaha :

Mencetak mahasiswa yang kritis, dinamis, progressif, Inovatif, inspiratif dan berjiwa entrepreneur.

Mengakomodasi dan memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 11

Fungsi

LKM UNHASY berfungsi sebagai :

Salah satu sarana menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Wahana penyalur aspirasi Mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak Mahasiswa.

Wahana pengembangan keterampilan berorganisasi, berpolitik, manajemen, dan kepemimpinan Mahasiswa.

Wahana peningkatan kesadaran berpikir ilmiah, kritis, rasionalis, dinamis, sistematis, berorientasi ke depan, dan penyiapan kader-kader Mahasiswa untuk masa depan yang lebih baik.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Anggota LKM UNHASY adalah setiap mahasiswa yang terdaftar dan diakui menjadi Mahasiswa UNHASY aktif.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 13

Permusyawaratan

Forum Permusyawaratan Mahasiswa terdiri atas :

Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, selanjutnya disebut Kongres Mahasiswa UNHASY;

Musyawarah mahasiswa Fakultas; (Kongres Mahasiswa unhasy tingkat fakultas disebut musyawarah mahasiswa)

Kongres Luar Biasa Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, selanjutnya disebut KLB Mahasiswa UNHASY;

Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut MLB Mahasiswa Fakultas;

Pasal 14

Rapat

Rapat dalam LKM UNHASY terdiri atas :

1. Rapat Gabungan Pimpinan
2. Rapat Pimpinan DPM
3. Rapat Pimpinan BEM
4. Rapat Paripurna
5. Rapat Kabinet
6. Rapat Koordinasi
7. Rapat Departemen

BAB IX

KEPEMIMPINAN

Pasal 15

Kekuasaan LKM UNHASY terdiri atas :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua DPM kepemimpinan Legislatif tertinggi dalam LKM UNHASY.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang dipimpin oleh Presma UNHASY yang melaksanakan kepemimpinan Eksekutif tertinggi dalam LKM UNHASY.
3. Dewan Perwakilan Wilayah Fakultas, adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa di tingkatan Fakultas yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua DPM, dalam LKM UNHASY.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkatan Fakultas yang selanjutnya dipimpin oleh Gubernur, dalam LKM UNHASY.
5. Himpunan Mahasiswa Prodi, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkatan Jurusan/Prodi yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua HMP, dalam LKM UNHASY.
6. Koordinator Mahasiswa yang selanjutnya disebut KOSMA adalah pimpinan tertinggi di dalam kelas

BAB X

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan/keuangan LKM UNHASY diperoleh dari :

1. Dana kemahasiswaan yang telah dianggarkan
2. Iuran anggota
3. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan azas dan tujuan LKM UNHASY.

BAB XI

TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 17

Tata Urutan Peraturan LKM UNHASY adalah:

1. AD/ART UNHASY;
2. Ketetapan Forum Mahasiswa;
3. Undang-Undang dan Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa; dan
4. Peraturan Fakultas, dan Keputusan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 18

Tata Urutan Peraturan Lembaga Kesatuan Mahasiswa merupakan sistem hukum yang berjenjang.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres Mahasiswa UNHASY.

Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar ini akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 20

Anggaran Dasar ini berkekuatan hukum dan sah sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal :

Waktu :

PIMPINAN SIDANG KOMISI A

………… ………… …………

KEPUTUSAN KONGRES MAHASISWA

LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG TAHUN 2023

NO: 01/KONGRES MAHASISWA/LKM-UNHASY/X/2023

TENTANG ANGGARAN DASAR KONGRES MAHASISWA LKM UNHASY 2023

Menimbang;

Bahwa guna mensukseskan pelaksanaan KONGRES LKM UNHASY perlu ditetapkan AD/ART LKM UNHASY 2023.

Mengingat;

AD/ART LKM UNHASY 2023.

Memperhatikan;

Hasil Musyawarah Sidang KONGRES LKM UNHASY.

PIMPINAN SIDANG MEMUTUSKAN

Menetapkan;

1. ANGGARAN DASAR KONGRES MAHASISWA LKM UNHASY 2023

Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari, bila mana terdapat kekeliruan.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal :

Waktu :

SIDANG TETAP

………… ………… …………

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG

TAHUN 2023

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Status Keanggotaan

Yang berhak menjadi anggota LKM UNHASY adalah :

1. Setiap seseorang yang terdaftar dan diakui menjadi Mahasiswa UNHASY;
2. Aktif, dalam artian masih menjadi Mahasiswa UNHASY.
3. Anggota LKM UNHASY dinyatakan hilang status keanggotaannya bila :
4. Meninggal Dunia;
5. Drop Out;
6. Selesai masa perkuliahannya di UNHASY;
7. Tidak lagi terdaftar menjadi Mahasiswa UNHASY;
8. Mahasiswa yang tidak berkomitmen dalam keorganisasian yang diemban/dijabat selama jenjang waktu 3 bulan

Anggota LKM UNHASY berkewajiban :

Pasal 2

Kewajiban Anggota

Setiap anggota harus menjaga dan memelihara nama baik LKM UNHASY;

Berpegang teguh kepada AD/ART LKM UNHASY;

Menjalankan dengan penuh Tri Dharma Perguruan Tinggi dan statuta UNHASY;

Ikut serta dalam usaha-usaha mewujudkan tujuan LKM UNHASY;

Bertanggung jawab terhadap kelangsungan LKM UNHASY;

Pasal 3

Hak Anggota

Anggota LKM UNHASY berhak :

1. Mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (equal before of the law);
2. Mengikuti setiap kegiatan perkuliahan dan setiap kegiatan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa;
3. Mengikuti setiap kegiatan LKM UNHASY yang diperuntukkan bagi Mahasiswa ataupun umum;
4. Menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan;
5. Memilih dan dipilih sebagai pengurus LKM UNHASY melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

BAB II

PERMUSYAWARATAN

Pasal 4

Kongres Mahasiswa UNHASY

Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, selanjutnya disebut KM UNHASY, adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa tertinggi dalam LKM UNHASY.

Kongres Mahasiswa UNHASY dilaksanakan 1 tahun sekali.

Kongres Mahasiswa UNHASY mempunyai wewenang :

Merubah dan menetapkan AD, ART LKM UNHASY, GBHO dan UU pendukung yang baru;

Memilih dan menetapkan pencalonan Presiden Mahasiswa pada aturan KPUM;

Menanggapi Laporan Pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa UNHASY;

Menerima atau menolak secara moril Laporan Pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY.

Pasal 5

Musyawarah Mahasiswa Fakultas

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa yang dilaksanakan di Fakultas masing-masing dalam LKM UNHASY.
2. Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaksanakan 1 tahun sekali.
3. Musyawarah Mahasiswa Fakultas berwenang :
4. Menentukan persyaratan calon DPMF, Gubernur serta Wakil Gubernur dan Ketua HMP;
5. Menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan HMP;
6. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan HMP;.
7. Peraturan/perundang-undang BEM Fakultas dibentuk dengan menyesuaikan pada AD/ART LKM UNHASY dan sekurang-kurangnya memuat :
8. Bentuk dan sistem pemerintahan BEM Fakultas dan HMP;
9. Ketentuan – ketentuan mengenai BEM fakultas dan HMP.

Pasal 6

Kongres Luar Biasa Mahasiswa UNHASY

Kongres Luar Biasa Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari, selanjutnya disebut KLB Mahasiswa UNHASY, adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa UNHASY yang dilaksanakan dalam keadaan darurat.

Maksud Darurat, sebagaimana disebut pada ayat 1, adalah:

Kosongnya jabatan Presma Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY sebelum habis masa jabatan sesuai SK dari Rektor;

Vakumnya roda organisasi dalam BEM UNHASY maupun DPM UNHASY;

Apabila terjadi perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dapat diadakan KLB Mahasiswa UNHASY atas :

Keputusan dari pertimbangan DPM UNHASY setelah diadakan Rapat Paripurna yang membahas perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2; atau

Inisiatif perwakilan rapat maksimal 2 mahasiswa dari setiap kelas yang ada di kampus UNHASY.

KLB Mahasiswa UNHASY mempunyai wewenang :

1. Penyatuan Atap Organisasi intra yang ada dikampus UNHASY
2. Pembahasan nama lembaga di bawah LKM UNHASY
3. Pembahasan logo LKM UNHASY
4. Pembahasan AD/ART dan GBHO

Tata tertib pencalonan Presiden Mahasiswa pada aturan KPUM

1. Menentukan persyaratan calon DPM UNHASY dan Presma serta Wapresma BEM UNHASY;
2. Menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY;
3. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY.

Pasal 7

Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa Fakultas

Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut MLB Mahasiswa Fakultas, adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa di tingkat Fakultas yang dilaksanakan dalam keadaan darurat.

Maksud Darurat, sebagaimana disebut pada ayat 1, adalah:

Kosongnya jabatan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebelum habis masa jabatan sesuai SK dari Dekan;

Vakumnya roda organisasi dalam BEM F maupun DPM;

1. Apabila terjadi perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dapat diadakan MLB Mahasiswa Fakultas atas :
2. Keputusan dari pertimbangan DPM setelah diadakan Rapat Paripurna yang membahas perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2; atau
3. Inisiatif perwakilan kosma kelas dari setiap kelas yang ada di Fakultas yang bersangkutan.
4. MLB Mahasiswa Fakultas mempunyai wewenang :
5. Menentukan persyaratan calon DPM, Gubernur serta Wagub BEM F dan HMP;
6. Menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
7. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

BAB III

RAPAT

Pasal 8

Rapat Gabungan Pimpinan

Rapat Gabungan Pimpinan adalah Rapat koordinasi antara pimpinan DPM UNHASY, DPM F, BEM UNHASY, BEM F, dan HMP.

Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah Pengurus Harian

1. Rapat Gabungan Pimpinan berfungsi untuk membahas :
2. Konstalasi yang berkembang di UNHASY, di lingkup civitas akademik;
3. Mempersiapkan pembentukan Undang-Undang pendukung AD/ART jika diperlukan.

Pasal 9

Rapat Pimpinan DPM

Rapat Pimpinan DPM adalah Rapat koordinasi antara pimpinan DPM UNHASY dan DPM.

Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah Ketua dan Sekretaris.

Rapat Pimpinan DPM berfungsi untuk membahas :

1. Kendala-kendala yang muncul dalam tubuh DPM;
2. Mengkoordinasikan AD/ART dan GBHO LKM UNHASY dengan peraturan/perundang-undangan Fakultas;
3. Membentuk Undang-Undang pendukung AD/ART.
4. Rapat Pimpinan DPM dilaksanakan minimal sekali dalam setahun atau 4 bulan menjelang Kongres Mahasiswa UNHASY.

Pasal 10

Rapat Pimpinan BEM

Rapat Pimpinan BEM adalah Rapat koordinasi antara pimpinan BEM UNHASY, dan BEM Fakultas.

Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah Presma dan Menteri Sekretaris.

Rapat Pimpinan BEM berfungsi untuk membahas :

1. Kendala-kendala yang muncul dalam tubuh BEM;
2. Mempersiapkan dan menentukan konsep agenda Posmaru.
3. mengevaluasi program kerja
4. Mempersiapkan dan menentukan konsep agenda dies natalis.

Pasal 11

Rapat Paripurna

Rapat Paripurna adalah Rapat internal dalam tubuh DPM.

Rapat Paripurna berfungsi untuk membahas :

1. Pemilihan Unsur pimpinan DPM yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta menentukan komposisi untuk Komisi;
2. Penentuan kebijakan ketika terjadi kevakuman dalam roda organisasi BEM;

Hal-hal lain yang menjadi wewenang DPM.

Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Paripurna ditentukan oleh DPM.

Pasal 12

Rapat Kabinet

Rapat Kabinet adalah Rapat internal dalam tiap-tiap BEM.

1. Rapat Kabinet berfungsi untuk membahas :
2. Rapat kerja, arah BEM;
3. Hal-hal lain yang menjadi wewenang BEM.
4. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Kabinet ditentukan oleh BEM.

Pasal 13

Rapat Koordinasi

Rapat Koordinasi adalah Rapat internal antara Menteri dan Departemen-departemen dibawahnya.

1. Rapat Koordinasi berfungsi untuk membahas :
2. Koordinasi kerja Menteri dengan Departemen-departemen dibawahnya;
3. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
4. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Koordinasi ditentukan oleh BEM.

Pasal 14

Rapat Departemen

Rapat Departemen adalah Rapat internal dalam Departemen.

Rapat Departemen berfungsi untuk membahas :

1. Koordinasi agenda kerja Departemen;
2. Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Departemen.
3. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Departemen ditentukan oleh BEM

BAB IV

OTONOMI FAKULTAS

Pasal 15

Wilayah Fakultas

Peraturan yang berada di lingkungan Fakultas bernama PERDAF (Peraturan Daerah Fakultas)

Pasal 16

Wilayah Fakultas merupakan secara konstitusi bagian dari hierarki LKM UNHASY yang melaksanakan kepemimpinan di wilayah Fakultas masing-masing.

Wilayah Fakultas institusi masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai hubungan hierarki LKM UNHASY.

HMP berada di bawah garis Gubernur Fakultas masing-masing.

Pasal 17

Kewenangan

LKM UNHASY di tingkatan Fakultas mempunyai kewenangan :

Mengurus operasional organisasi di wilayahnya masing-masing secara administratif;

Merumuskan peraturan/perundang-undangan dan Rekomendasi untuk BEM Fakultas yang dilaksanakan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas;

Mengatur kebijakan sektoral;

Mengurus dana BEM Fakultas.

Pasal 18

Pendanaan

Untuk dana kemahasiswaan bagi BEM di tingkat Fakultas dilimpahkan pada Badan Kemahasiswaan Fakultas.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 19

1. Setiap pengurus dalam LKM UNHASY berkewajiban melaksanakan AD/ART dan GBHO Kongres Mahasiswa UNHASY.
2. Pejabat inti pengurus dalam tubuh LKM UNHASY dilarang rangkap jabatan.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ayat (1) dan (2) dikenai sanksi :

Peringatan dari DPM UNHASY;

Apabila peringatan tidak dipatuhi, maka pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatan apapun dalam tubuh LKM UNHASY berdasar keputusan rapat DPM UNHASY.

Peraturan operasional Organisasi dilaksanakan secara hierarki.

Urutan Hierarki Organisasi :

1. AD/ART , GBHO dan Ketetapan Kongres Mahasiswa UNHASY lainnya
2. Rapat Pimpinan DPM
3. Rapat Pimpinan Presma
4. Peraturan LKM UNHASY
5. Peraturan/perundang-undang dan Ketetapan Musyawarah Mahasiswa Fakultas lainnya
6. Peraturan HMP

BAB VI

DPM UNHASY

Pasal 20

Tugas dan Wewenang

1. Membentuk dan mengesahkan Undang-Undang pendukung AD/ART bersama-sama DPM.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART, GBHO, dan ketentuan perundang-undangan lainnya, serta peraturan pelaksanaannya.
3. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa.
4. Bertanggungjawab terhadap konstituen masing-masing.
5. Melaksanakan tugas DPM UNHASY lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
6. Bila dalam pandangan DPM, BEM tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan DPM, maka DPM berwenang mengajukan memorandum I dengan batas waktu 30 hari. Kemudian jika BEM tetap melakukan penyimpangan, DPM berwenang mengajukan memorandum II dengan batas waktu 15 hari. Setelah batas waktu tersebut BEM tidak memperbaiki, maka dapat dilaksanakan sidang istimewa oleh DPM.

Pasal 21

Susunan Kepengurusan

Susunan Kepengurusan Lembaga Legislatif UNHASY minimal terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil ketua
3. Sekretaris
4. Bendahara
5. Komisi A bidang Perlindungan Hak dan Pemberdayaan Mahasiswa
6. Komisi B bidang Keorganisasian
7. Komisi C bidang Hubungan Antar Parlemen
8. Komisi D bidang Hubungan Birokrasi

Penambahan komposisi Komisi dibahas dalam Rapat Paripurna.

Apabila terjadi kevakuman kepengurusan, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu yang diputuskan melalui Rapat Paripurna.

Tugas masing-masing pengurus dan pergantian antar waktu diatur dalam Tata Tertib Lembaga Legislatif UNHASY.

Masa kepemimpinan Lembaga Legislatif UNHASY terhitung 1 tahun sejak SK turun dari Rektor.

BAB VII

Presma UNHASY

Pasal 22

Tugas dan Wewenang

1. Mengoptimalkan pelaksanaanAD/ART, GBHO, dan keputusan hasil Kongres Mahasiswa UNHASY lainnya.
2. Membuat kebijakan yang menjadi standarisasi Lembaga Eksekutif LKM UNHASY dalam melaksanakan AD/ART, GBHO, dan keputusan hasil Kongres Mahasiswa UNHASY lainnya.
3. Menentukan arah LKM yang bersifat universal dan menjadi acuan bagi BEM Fakultas-fakultas.
4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di hadapan Kongres Mahasiswa UNHASY.
5. Melaksanakan tugas Lembaga Eksekutif UNHASY lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang- undangan.
6. Melaporkan dan berkoordinasi Proposal kegiatan BEM kepada DPM dan harus mendapatkan persetujuan DPM.
7. Melaporkan dan bertanggung jawab segala laporan Pertanggung jawaban .

Pasal 23

Susunan Kepengurusan

Susunan Kabinet Lembaga Eksekutif UNHASY minimal terdiri dari :

1. Presiden Mahasiswa
2. Wakil Presiden Mahasiswa
3. Menteri Sekretaris
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Luar Negeri
7. Menteri Sumber Daya Manusia
8. Menteri pendidikan, seni dan budaya

Penambahan komposisi Kabinet ditentukan oleh Presiden Mahasiswa.

Tugas Kabinet diatur dalam Rapat Kerja Lembaga Eksekutif UNHASY.

Apabila terjadi kevakuman kepengurusan, maka dapat dilakukan reshuffle oleh Presiden Mahasiswa.

Masa kepemimpinan Lembaga Eksekutif UNHASY terhitung 1 tahun sejak SK turun dari Rektor.

BAB VIII

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 24

Bentuk, Sifat, dan Fungsi

1. KPUM bersifat independen dalam struktur LKM UNHASY.
2. Kepengurusan KPUM dinyatakan sah setelah mendapat Surat Keputusan dari DPM UNHASY.
3. Masa kepengurusan KPUM adalah selama masa pemira.

Pasal 25

Fungsi

1. KPUM berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu Raya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UNHASY, Dewan Perwakilan Wilayah, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas maupun Gubernur dan Wakil gubernur Fakultas secara langsung oleh mahasiswa, serta untuk memilih Ketua HMP secara demokratis.
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemira setelah berkonsultasi dengan DPM-U dan BEM-U/BEM-F.
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemira.
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada Mahasiswa melalui media majalah dinding (mading).

Pasal 26

Syarat-syarat pencalonan

1. Mengisi formulir pendaftaran pada sekertariat KPUM.
2. Harus menyerahkan KTM UNHASY dan sertifikat posmaru.
3. Menyerahkan foto 2X3 (hard file dan soft file).
4. Calon ketua DPM & BEM Universitas harus dari semester serta melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
5. Menyerahkan surat pengunduran diri bagi calon yang masih aktif menjadi pejabat inti organisasi mahasiswa intra kampus.
6. Menyerahkan 10 KTM dari tiap-tiap Fakultas di UNHASY dan mempunyai surat rekomendasi dari dekan fakultas yang bersangkutan.
7. IPK minimal 3.00 untuk calon ketua dan wakil DPM dan BEM.
8. Pernah aktif sebagai pengurus Organisasi internal fakultas minimal 2 tahun.
9. Melampirkan surat rekomendasi dari dekan dan wakil dekan fakultas masing-masing calon dengan tanda tangan diatas materai.
10. Hafal mars UNHASY
11. Memiliki Visi dan Misi
12. Calon ketua dan wakil tidak boleh barada di dua kampus

Pasal 27

Perselisihan Hasil Pemilu

Jika terjadi perselisihan hasil PEMILU maka dibentuk Komisi Yudisial yang beranggotakan dosen pembimbing kemahasiswaan atau wakil Dekan 1 dari masing-masing fakultas.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Undang – Undang pendukung.

Anggaran Rumah Tangga ini berkekuatan hukum dan sah sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu :16.19

SIDANG KOMISI A

M. Nazarudin Aqil Huzail Ade Silvia

KEPUTUSAN KONGRES MAHASISWA

LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA

UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG

NO: 02/KONGRES MAHASISWA/LKM-UNHASY/X/2023

TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA KONGRES MAHASISWA LKM UNHASY 2023

Pimpinan sidang pleno setelah :

Menimbang;

Bahwa guna mensukseskan pelaksanaan KONGRES MAHASISWA LKM UNHASY perlu ditetapkan Tata Tertib Kongres Mahasiswa LKM UNHASY 2020

Mengingatkan;

AD/ART LKM UNHASY 2020

Memperhatikan;

Saran dan pendapat peserta Sidang KONGRES MAHASISWA LKM UNHASY 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASY 2023.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali kemudian hari jika ada kekeliruan.

Keputusan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu :16.21

SIDANG PLENO TETAP

M. Nazarudin Aqil Huzail Ade Silvia

GARIS - GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI

( GBHO LKM UNHASY )

BAB I

PENDAHULUAN

Definisi

GBHO yang disusun dalam bentuk garis – garis besar program sebagai wujud dan ketetapan KONGRES LKM UNHASY untuk mewujudkan cita – cita organisasi di lingkungan universitas Hasyim Asy`ari sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar ( AD ) dan Anggaran Rumah Tangga ( ART ).

Maksud

Garis – Garis Besar Haluan Organisasi ( GBHO ) dibuat dengan maksud memberikan arahan dan sasaran serta langkah pencapaian tujuan LKM UNHASY

Landasan

Pembentukan dan penetapan GBHO LKM UNHASY berlandaskan kepada AD dan ART LKM UNHASY

Fungsi

Garis – Garis Besar Haluan Organisasi ( GBHO ) befungsi sebagai pedoman dalam merencanakan kebijakan di semua struktural sesuai dengan ketetapan KONGRES LKM UNHASY

Gambaran Umum Isi GBHO

Garis – Garis Besar Haluan Organisasi ( GBHO ) LKM UNHASY memuat :

Meliputi definisi, maksud, landasan, fungsi dan gambaran umum isi GBHO serta pelaksanaan

BAB II

Struktur Organisasi

1. Ketua Umum
2. Wakil ketua umum
3. Sekretaris umum
4. Bendahara
5. Departemen-departemen
6. Struktural pendukung lainnya

BAB III

Kepengurusan

Penjelasan tentang mekanisme kerja antar kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan dan deskripsi kerja pengurus

BAB IV

Program Kerja Organisasi

Memuat pola umum organisasi dan pola dasar organisasi

BAB V

KEPENGURUSAN

Mekanisme Kerja Kepengurusan Dalam struktur kelembagaan ketua LKM UNHASY adalah penanggungjawab aktifitas kepengurusan LKM UNHASY. Dalam pelaksanaan aktifitas kepengurusan tersebut ketua umum dapat mendelegasikan fungsi dan wewenangnya kepada pengurus inti LKM UNHASY, yang terdiri dari sekretaris, bendahara, ketua departemen mengenai strategi dalam LKM UNHASY ketua-ketua departemen memiliki tanggungjawab dalam kebijakan perencanaan, pengontrolan, evaluasi, serta pengarahan terhadap aktifitas rutin departemen masing – masing. Dalam memecahkan persoalan – persoalan strategi dan mendasar ketua umum dapat mengadakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Departemen. Agar terdapat keterpaduan, keterarahan, keteraturan dan kekompakan dalam melaksanakan tugas, maka ditetapkan sebagai berikut:

Keterpaduan kegiatan.

Kegiatan Organisasi dilakukan dengan sistem terpadu, artinya setiap aktivitas organisasi siapa pun pelaksananya dalam kepengurusan akan senantiasa memiliki keterkaitan

Pola Komunikasi

Komunikasi dilakukan satu arah secara terstruktur dari atas kebawah atau dari bawah keatas.

Kebijakan keuangan.

Setiap departemen yang mempunyai agenda kegiatan dan program kerja dapat membentuk sebuah kepanitiaan dengan departemen lain dan mengupayakan langkah – langkah serta penggalian dana internal sebelum meminta dan disubsidi oleh bendahara LKM UNHASY.

Pengeluaran keuangan organisasi harus terpusat pada bendahara LKM UNHASY setelah mendapat persetujuan dari ketua umum dan setiap akhir bulan bendahara melaporkan keuangan kepada ketua umum, Bendahara Umum mempunyai hak merencanakan langkah – langkah strategis untuk menggali dana internal dan eksternal di masing – masing wilayah dengan mendapat persetujuan dari ketua umum.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat Kerja ( RAKER )

Rapat kerja adalah rapat yang dilaksanakan pengurus untuk merencanakan dan menyusun program kerja selama 1 periode kepengurusan serta membahas permasalahan yang berkenaan dengan LKM UNHASY.

1. Musyawarah kerja dilaksanakan dalam rangka menjalankan hasil keputusan KONGRES LKM UNHASY
2. Rapat kerja dipimpin oleh ketua umum LKM UNHASY
3. Rapat kerja dilaksanakan sedikitnya 2x dalam 1 periode kepengurusan
4. Dalam Rapat kerja jika diperlukan dapat mengundang pembina
5. Rapat Departemen
6. Rapat Departemen adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing – masing Departemen untuk membahas dan mengevaluasi program kerja dalam Departemennya sesuai hasil rapat serta menyusun rencana kerja program selanjutnya
7. Rapat departemen gabungan minimal dilaksanakan 1 bulan 1x
8. Rapat departemen oleh koordinator Departemen jika diperlukan dapat mengundang ketua umum LKM UNHASY
9. Rapat Departemen dihadiri oleh seluruh staf Departemen
10. Rapat Evaluasi

Rapat Evalusi terdiri dari :

1. Rapat Evaluasi Organisasi

1.1. Rapat ini dipimpin oleh Ketua umum LKM UNHASY untuk mengetahui hasil kerja Departemen secara keseluruhan dan menentukan kebijakan - kebijakan selanjutnya. Rapat ini dilaksanakan 3 bulan sekali selama periode kepengurusan

1.2. Peserta rapat evaluasi organisasi adalah seluruh pengurus LKM UNHASY

2. Rapat Evaluasi Kegiatan

1.1. Rapat ini dipimpin oleh ketua pelaksana kegiatan untuk membahas dan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan serta langkah – langkah selanjutnya yang akan diambil

1.2. Rapat ini dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah kegiatan

1.3. Dalam setiap rapat evaluasi jika diperlukan dapat mengundang Ketua Umum untuk memberikan masukan, saran, kritik dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan – kebijakan selanjutnya

1. Rapat pimpinan Umum
2. Rapat pimpinan pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara serta koordinator – koordinator Departemen
3. Rapat pimpinan pengurus dilaksanakan minimal 2 bulan sekali atau lebih jika dianggap perlu
4. Rapat pimpinan pengurus dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan LKM UNHASY untuk memecahkan masalah yang berkembang serta mangambil kebijakan yang diperlukan

Deskripsi Kerja

Pelindung

Pelindung adalah Rektor Universitas Hasyim Asy’ari

Penasehat

Penasehat adalah Biro Kemahasiswaan Universitas Hasyim Asy’ari

Pembina

Status

Pembina LKM UNHASY adalah orang yang ditunjuk oleh Biro kemahasiswaan UNHASY

Tugas dan Wewenang

Pembina memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pengarahan terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh LKM UNHASY
2. Memberikan nasehat bila dipandang perlu terhadap aktivitas kepengurusan
3. Membantu serta mempermudah hubungan dengan pihak lain
4. Ikut membantu menyelesaikan masalah – masalah keorganisasian jika dipandang perlu.

Pengurus

A. Status

1. Pengurus adalah mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari yang masih aktif
2. Pengurus diangkat oleh Ketua masing masing struktur di bawah LKM UNHASY yang disahkan dengan surat keputusan biro kemahasiswaan Universitas Hasyim Asy’ari
3. Apabila pengurus tidak aktif selama 3 bulan maka akan di adakan reshufle
4. Ketua Umum LKM UNHASY dipilih melalui pemilihan Raya LKM UNHASY
5. Masa bakti kepengurusan adalah 1 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali

B. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil keputusan KONGRES LKM UNHASY.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang diwakilkan kepada Ketua Umum

C. fungsi Pengurus terdiri dari

1. Ketua Umum

1.1. Memegang wewenang tinggi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan LKM UNHASY.

1.2.Bertanggungjawab terhadap fungsi - fungsi keorganisasian LKM UNHASY.

1.3. Memimpin, mengkordinasi dan mengintruksi serta sebagai penentu kebijakan tertinggi LKM UNHASY, memegang kebijakan strategi organisasi antara lain : mengetahui surat masuk dan keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat mandat dan surat keputusan atas nama organisasi.

2. Sekretaris

1. Bertanggungjawan langsung kepada ketua umum atas pelaksanaan program kesekretariatan.
2. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan kesekretariatan secara umum.
3. Mengeluarkan surat – surat intern organisasi, serta surat mandat untuk kegiatan intern LKM UNHASY bila ketua umum berhalangan.
4. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar dari organisasai.
5. Menginventarisir dan melaporkan kekayaan LKM UNHASY pada akhir kepengurusan.

3. Bendahara

1. Bertanggungjawab langsung kepada ketua umum atas pengelolaan keuangan organisasi dan mengalokasikannya sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing – masing kegiatan.
2. Mengontrol pengelolaan dana dan distribusi pada setiap Departemen.
3. Mengumpulkan dana dengan mencari alternatif sumber dana.
4. Membuat laporan keuangan secara berkala kepada ketua umum.
5. Mencatat pengeluaran dan pemasukan organisasi secara terperinci

4. Koordinator Departemen

1. Membantu ketua umum dalam menjalankan aktivitas organisasi.
2. Bertanggungjawab terhadap dinamisasi dan konsultasi.
3. Menyelenggarakan rapat Departemen dan menyusun program kerja anggota departemen

BAB VI

POKOK – POKOK DAN REKOMENDASI KERJA ORGANISASI

Pola Dasar Program Kerja

1. Pengertian

Program kerja Organisasi pada dasarnya adalah implementasi dari GBHO LKM UNHASY yang disusun untuk jangka panjang waktu tertentu dengan tujuan satu periode kepengurusan.

1. Tujuan Program Kerja.

Tujuan Program Kerja LKM UNHASY dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tujuan program kerja jangka pendek yang meliputi jangka waktu satu tahun (satu periode kepengurusan)
2. Tujuan program kerja jangka panjang yang meliputi jangka waktu tiga tahun

Tujuan Program kerja jangka pendek.

Tercapainya koordinasi dan integrasi antara pengurus dengan anggota LKM UNHASY demi terlaksanaaya program kerja yang dapat meningkatkan potensi keorganisasian dikalangan Mahasiswa UNHASY untuk selanjutnya mengarah pada tercapainya pola pengkaderan yang terpadu berkesinambungan untuk suatu organisasi yang benar menuju tercapainya tujuan jangka panjang.

Tujuan Program Kerja Jangka Panjang.

Terbentuknya LKM UNHASY sebagai sebuah organisasi dengan basis pesantren dan entrepreneurship yang berpengaruh tidak hanya dilingkungan UNHASY tetapi juga ditengah masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat.

1. Target Program Kerja

Target program kerja disesuaikan dengan tujuan dan tugas masing - masing.

1. Landasan Program Kerja.

LKM UNHASY merupakan organisasi profesi yang berbasi pesantren dan entrepreneurship sebagai landasan program kerja yang pelaksanaan harian berada dibawah super visi Biro Kemahasiswaan, oleh karena itu segala kegiatan harus bermanfaat sebesar – besarnya bagi civitas akademika khususnya dan masyarakat diluar kampus pada umumnya dengan masih memegang teguh sebagai organisasi kemahasiswaan

1. Wawasan Program Kerja

Program kerja LKM UNHASY diharapkan dapat mewujudkan nuansa keorganisasian mahasiswa dalam keilmuan.

1. Proritas Program Kerja.

Program kerja LKM UNHASY diproritaskan pada rekomendasi Biro Kemahasiswaan UNHASY, untuk mengoptimalkan kompetensi mahasiswa.

1. Sasaran Program Kerja.
2. Pengurus LKM UNHASY.
3. Organisasi lain yang ada dikampus dan diluar kampus UNHASY.
4. Mahasiswa UNHASY.
5. Masyarakat pada umumnya.
6. Pelaksana Program Kerja.

Program kerja yang disepakati dilaksanakan oleh semua pengurus LKM UNHASY yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi sesuai dengan jalur koordinasi yang telah ditentukan.

1. Evaluasi Program Kerja.

Evaluasi program kerja LKM UNHASY dilaksanakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program – program yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan program kerja yang akan datang.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

Dalam surat – menyurat digunakan kop resmi logo organisasi sebelah kiri dan logo UNHASY sebelah kanan dan Stempel dibubuhkan sebelah kiri tanda tangan ketua / sekretaris

Surat Masuk dan Keluar

Memuat arsip surat, permohonan surat masuk, dan surat keluar, tanggal, pengirim, dan keterangan

Buku hasil Rapat

Memuat hasil – hasil rapat yang dikumpulkan atau ditulis langsung pada buku tersebut, buku ini berguna untuk memantau perkembangan organisasi serta memudahkan dalam pengambilan keputusan

Buku Tamu

Memuat identitas setiap tamu datang berkunjung kesekretariat LKM UNHASY, buku ini berguna sebagai arsip dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak tertentu

Buku pinjaman Arsip dan Alat Kesekretariatan

Disediakan sebagai sarana untuk memudahkan pengonttrolan keluar masuknya barang Inventaris LKM UNHASY yang dipinjam pihak luar, peminjaman ini harus seijin ketua dan atau atas nama yang kemudian mendisposisikan pada sekretaris

Buku Data

Memuat data – data pengurus, anggota LKM UNHASY, struktural dan juga bagan kepengurusan

Organigram

Berisi struktur organisasi dan setiap pengurus LKM UNHASY

Papan Program Kerja

Berisi jadwal program kerja yang akan dilaksanakan LKM UNHASY selama 1 periode kepengurusan berguna untuk mengingatkan pengurus akan kegiatan

Papan Komunikasi

Berisi informasi yang ditujukan kepada pengurus dan diketahui khalayak ramai untuk pelayanan sepenuhnya adalah tanggungjawab sekretaris umum

Lemari Penyimpanan

Lemari Arsip :

Memuat arsip – arsip kegiatan, baik masa sebelum ataupun pada masa periode kepengurusan yang sedang berjalan

Arsip terbagi menjadi 2 jenis, yaitu arsip organisasi secara umum yang kuncinya dipegang oleh sekretaris dan arsip khusus ( arsip keuangan bendahara, perDepartemen ) yang wewenangnya diserahkan pada masing – masing arsip dibuat jika diperlukan

Lemari Peralatan :

Memuat peralatan – peralatan organisasi LKM UNHASY keluar masuknya peralatan dibawah tanggungjawab Departemen yang membidanginya atas ijin dan sepengetahuan ketua umum

Sistem Pengelolahan Data Kesekretariatan dan Administrasi

Surat Menyurat

1. Alur Surat
2. Surat Masuk
3. Surat yang diterima LKM UNHASY dari luar organisasi
4. Surat Keluar
5. Surat yang ditujukan kepada publik intern meliputi: Pengurus, Pembina dan dekanat/rektorat
6. Surat yang ditujukan kepada publik eksternal meliputi civitas akademik dan lain diluar organisasi
7. Penomoran Surat

Intern : XXX/A/P/O/U/BB/TH

Ekstern: XXX/B/P/O/U/BB/TH

Keterangan:

X : Nomor surat ditulis dalam 3 angka

A : Kode tetap untuk publik intern

B : Kode tetap untuk publik ekstern

P : Nama kegiatan

O: Organisasi

U: universitas ( ditulis UNHASY )

BB: Bulan keluar surat (ditulis romawi)

H : Tahun (ditulis angka)

Proposal

1. Proposal selesai minimal 4 minggu sebelum kegiatan dimulai.
2. Proposal ditanda tangani atas sepengetahuan / persetujuan dari Ketua LKM UNHASY, Pembina, dekan/ wakil rektor III
3. Proposal memuat deskripsi kegiatan

Alur Proposal :

Kepanitiaan kegiatan membuat proposal sesuai dengan aturan yang berlaku;

1. Proposal diberikan kepada sekretaris umum untuk ditanda tangani Ketua LKM UNHASY Laporan Kegiatan :
2. Laporan diserahkan kepada sekretaris maksimal 3 minggu setelah kegiatan berakhir dengan disetujui oleh Ketua LKM UNHASY
3. Laporan dilampiri surat masuk dan surat keluar serta arsip yang berhubungan dengan kegiatan tersebut
4. Laporan harus dibuat secara obyektif
5. Sebelum diserahkan, laporan dikemukakan dulu di depan panitia
6. Sekretaris berhak menegur apabila kepanitiaan terlambat melaporkan kegiatannya
7. Laporan ditembuskan kepada Biro Kemahasiswaan UNHASY

BAB VI

PENUTUP

Pelaksanaan

Garis - Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang telah ditetapkan oleh KONGRES LKM UNHASY dilaksanakan oleh pengurus LKM UNHASY

Garis - Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan organisasi melalui mekanisme yang diatur dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART )

Apabila ada kekeliruan maka akan di adakan peninjauan kembali

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu : 16.24

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

M. Nazarudin Aqil Huzail Ade Silvia

KEPUTUSAN KONGRES MAHASISWA

LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY’ARI TEBUIRENG JOMBANG 2023

NOMOR : 03/KONGRES MAHASISWA/LKM-UNHASY/X/2023

TENTANG GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KONGRES MAHASISWA LKM UNHASY 2023

Pimpinan sidang pleno setelah :

Menimbang;

Bahwa guna mensukseskan pelaksanaan KONGRES MAHASISWA UNHASY perlu ditetapkan GBHO LKM UNHASY.

Mengingat;

AD/ART UNHASY.

Memperhatikan;

Saran dan pendapat peserta sidang Kongres Mahasiswa UNHASY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Garis Besar Haluan Organisasi LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASY

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika ada kekeliruan.

Keputusan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : 26 Oktober 2023

Waktu :16.26

SIDANG PLENO TETAP

M. Nazarudin Aqil Huzail Ade Silvia